

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Semua pihak termasuk pemerintah mencoba mengatasi masalah ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu cara untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yaitu dengan mencoba untuk mewujudkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa atau yang sering dikenal dengan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). (Abdul dan Syam, 2012:108).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawas yang dilakukan oleh APIP terdiri dari review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana ada rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. Inspektorat Provinsi sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan pemerintah, pelaksana pembina atas penyelenggara pemerintah provinsi (pusdiklatwas BPKP, 2008).

Peran Inspektorat diantaranya yaitu: penyelenggara perencanaan program pengawasan penyelenggaraan pengawasan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review, dan penilaian tugas pengawasan; penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan visi dari Inspektorat yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah Jawa Barat melalui pengawasan berwawasan pembinaan (Inspektorat provinsi Jawa Barat, 2012).

Pentingnya Auditor internal pemerintah dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Indra Bastian, 2014:36).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal/inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal/inspektorat selaku pengawas intern pemerintah akan dapat memberikan sumbangan perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasikan. Sebagai suatu contoh, untuk menentukan keandalan informasi keuangan, inspektorat melakukan *review* terhadap laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menghasilkan suatu kualitas audit yang baik. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses *review* ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Putu Ira Indayani, Edy Sujana, dan Ni Lu Gede Erni Sulindawati.2015).

Dalam Inspektorat auditor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Menurut Mangkunegara (2014:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja auditor internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeriksaan agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam perusahaan. Kinerja auditor yang baik juga akan meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam operasional perusahaan. Selain itu kinerja auditor internal akan menentukan kemajuan perusahaan karena dalam pemeriksaannya yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan memberikan rekomendasi.

Kinerja yang kurang baik dari auditor internal perusahaan dapat menimbulkan permasalahan yang tentunya akan merugikan perusahaan. Baik atau tidaknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor (Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha, 2015).

Kinerja auditor internal yang kurang baik tercermin pada proses pencatatan yang belum dilakukan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kebijakan yang tidak tepat, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian intern.

Fenomena yang pertama terjadi dengan kinerja auditor internal pada inspektorat yaitu salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, kepala inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada

program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhapen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800. masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal. (<http://aceh.tribunnews.com/201608/20/dewan-nilai-inspektorat-lemah> .02 september 2016, 22:25 WIB)

Fenomena kedua yang terjadi dengan kinerja auditor internal pada inspektorat yaitu DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan internal eksekutif masih lemah. Anggota komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Ernawan mengatakan bukti dari kelemahan inspektorat berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KBB selama 3 tahun berturut-turut disclaimer atas laporan keuangannya. Dia mengatakan inspektorat memiliki fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan menilai tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Bupati seharusnya tegas terhadap bawahan yang tidak bisa bekerja, selain program yang tidak berjalan, masalah lainnya adalah lemahnya pelaporan keuangan pemkab, ini berimplikasi pada hasil yang belum bisa dinikmati sepenuhnya, oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

(<http://bandung.bisnis.com/m/read/20120510/6/182176/dprd-kbb-nilaiikinerja-inspektorat-lemah> 03 September 2016, 01:05 WIB).

Fenomena ketiga yang terjadi dengan kinerja auditor internal pernah terjadi pada inspektorat Kabupaten Purwakarta dimana kinerja auditor internal inspektorat masih kurang baik, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Inspektorat Purwakarta Rivai, yang menyatakan kinerja pihak inspektorat saat dipimpin Dadan Koswara dianggap lalai melakukan aturan kerja karena disyalir menggunakan anggaran dinas rangkap, yang tidak sesuai aturan kerja sehingga merugikan kas daerah sebesar Rp.154 juta. Karena kelalaian kinerja internal auditor inspektorat ini mengakibatkan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purwakarta ini dinyatakan wajib mengembalikan uang senilai Rp 154 juta ke kas daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provisi Jawa Barat. (Sumber: Garisnews.com, diunduh tgl 24 oktober 2013).

Berdasarkan fenomena di atas, pada kasus Inspektorat Kota Aceh jika dikaitkan dengan dimensi kinerja auditor internal maka Mengelola aktivitas audit internal tidak terpenuhi, karena Sumber daya audit internal tidak sesuai, tidak memadai dan tidak dapat digunakan secara efektif. Dan untuk kasus pada Inspektorat KBB jika dikaitkan dengan dimensi kinerja auditor internal maka pelaksanaan penugasan tidak terpenuhi, karena auditor internal tidak mengidentifikasi informasi yang memadai, tidak handal, tidak relevan, dan tidak berguna. Sedangkan untuk kasus pada Inspektorat kabupaten Purwakarta jika dikaitkan dengan dimensi kinerja auditor internal maka pelaksanaan penugasan

tidak terpenuhi, karena auditor internal tidak mengidentifikasi informasi yang memadai, tidak handal, tidak relevan, dan tidak berguna.

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa kinerja auditor internal kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya, serta kurang ditanamkannya rasa tegas dan jujur dalam melakukan audit dan menunjukkan masih belum optimalnya kinerja auditor internal. Kinerja dari auditor internal menjadi tumpuan utama dalam keberhasilan seseorang auditor internal dalam melaksanakan kewajibannya. Kinerja auditor yang baik akan menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal, sehingga menghasilkan hasil audit yang handal atau terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajian (R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014).

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi Jawa Barat dikarenakan masih menemukan kelemahan atau permasalahan pada kinerja auditor internal nya. Oleh karena itu, penulis ingin megetahui lebih lanjut mengenai apa yang menyebabkan beberapa auditor internal di Inspektorat Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam menjalankan tugasnya.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk memperoleh kinerja yang baik. Memiliki sikap profesional bagi seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya akan semakin terjamin dan dapat bertanggung jawab, karena apabila seorang auditor internal tidak berperilaku profesional maka akan dapat mempengaruhi integritas akan apa yang telah dihasilkannya. Seorang auditor internal jika telah melaksanakan tugasnya secara

profesional, maka diharapkan akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang efektif sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (Yan Shandy Fauzi Nasution, 2011). Laporan hasil pemeriksaan sangat penting bagi auditor internal karena laporan tersebut mencerminkan kinerja auditor internal terhadap pekerjaannya, maka semakin baik profesionalisme auditor internal akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang semakin efektif sehingga menciptakan kinerja auditor internal yang lebih baik (R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014).

Motivasi bekerja dalam diri sangat penting peranannya dalam mendorong seseorang untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Motivasi kerja yang dimiliki oleh seorang auditor mendorong personal auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yaitu kinerja yang baik (Kadek Candra Dwi Cahyani, 2015).

Mangkunegara (2014:104) menyatakan bahwa jika seorang karyawan yang mempunyai motivasi kerja tinggi cenderung memiliki prestasi kerja atau kinerja yang tinggi, dan sebaliknya mereka yang prestasi kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi kerjanya rendah, sehingga dengan adanya penerapan atau pemberian motivasi yang benar akan meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian hasil pengembangan penelitian sebelumnya R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014 dengan judul Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Terhadap kinerja Audit Internal di Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Meskipun penelitian ini mengacu pada

penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, lokasi, teknik sampling, dimensi serta indikator penelitian.

berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFESIONALISME DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL” (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada Intansi Inspektorat Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana motivasi kerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
6. Seberapa besar pengaruh profesionalisme dan motivasi kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme dan motivasi kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi penulis sendiri sangat berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan sebagai persyaratan guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada materi Audit Internal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai pengaruh profesionalisme dan motivasi kerja terhadap kinerja auditor internal. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap tema ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat jl. Surapati No. 4, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 20115. Waktu penelitian dimulai pada mula januari sampai dengan selesai.